

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Siti Asyarah**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

E-mail: sitiasyarah@gmail.com

**ABSTRACT.** *This study was aimed to test and analyze the effects of policy implementation of regional development information system on data and information management of development in enabling effectiveness of regional development planning on Local Government Agencies (SKPD) of Sumedang Regency. Research method used was analytic descriptive with survey technique on independent variable of Effect of Policy Implementation of Regional Development Information System, and dependent variable of Effectiveness of Regional Development Planning on SKPD of Sumedang Regency. The population was 62 people from all of SKPD under Sumedang regency government. Sampling technique used was saturated sampling or census, where entire population were the respondents. Data collection was by document study and field study of observation, questionnaire, and interview. Data analysis technique in this study was path analysis. Testing result of main hypothesis showed that effect of policy implementation of regional development information system (X) on data and information management of regional development (Y) in enabling the effectiveness of regional development planning on SKPD (Z) was 25.5%. Effect of policy implementation of regional development information system (X) on data and information management of regional development (Y) was 16.0%. Effect of policy implementation of regional development information system (X) on effectiveness of regional development planning on SKPD (Z) was 25.2%. And effect of data and information management of regional development (Y) on effectiveness of regional development planning on SKPD (Z) was 27.7%. Result of this study has implication on the effectiveness of regional development planning on SKPD of Sumedang regency, but there are issues need to address. To overcome problems in the implementation of regional development information system, it is recommended to increase number of personnel and improve their competency. As for overcoming the problems in data and information management of development, leaders should encourage data and information management to have better control. And for improvement in effectiveness of regional development planning by SKPD of Sumedang Regency, it is recommended to maintain good items, and to implement programs that promote public selfsupportability, economic equality, and better education.*

**Keywords:** *Policy implementsation, information system, planning*

**PENDAHULUAN**

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berbasis pada data dan informasi, dengan memperhatikan data pembangunan akan sesuai dengan kebutuhan, potensi, kendala, keterbatasan dan aspirasi masyarakat. Hal ini juga sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan

informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, demikian juga sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah, serta dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas

informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah.

Implementasi kebijakan adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan, ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Jones (1980) dalam Suaib Muhammad Ridha (2016; 82), dimana implementasi diartikan sebagai "getting a job done" dan "doing a".

Adapun fenomena masalah yang terjadi dalam hal ini adalah:

1. Kebijakan sistem informasi pembangunan daerah di Kabupaten Sumedang
2. belum dilaksanakan secara menyeluruh;
3. Manajemen data dan informasi pembangunan daerah belum baik;
4. Perencanaan pembangunan daerah belum efektif.

Dengan memperhatikan fenomena yang terjadi maka peneliti menduga adanya hubungan sebab akibat diantara implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah terhadap manajemen data dan informasi dalam mewujudkan efektivitas perencanaan pembangunan pada SKPD, dalam hal ini kami tertarik untuk meneliti yang berhubungan dengan fenomena tersebut dengan judul "Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Terhadap Manajemen Data Dan Informasi Pembangunan Dalam Rangka Mewujudkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Pada SKPD Kabupaten Sumedang".

Sehubungan dengan pernyataan masalah tersebut, maka pertanyaan masalah (problem question) utama yang penulis rumuskan adalah: "Adakah pengaruh implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah terhadap manajemen data dan informasi pembangunan dalam rangka mewujudkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah pada SKPD Kabupaten Sumedang?"

Selanjutnya dari pertanyaan masalah utama tersebut, peneliti merumuskan sub-sub pertanyaan masalah sebagai berikut.

1. Adakah pengaruh implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah terhadap manajemen data dan informasi pembangunan?
2. Adakah pengaruh manajemen data dan informasi pembangunan terhadap efektivitas perencanaan pembangunan daerah pada SKPD Kabupaten Sumedang?
3. Adakah pengaruh implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah terhadap efektivitas perencanaan pembangunan daerah pada SKPD Kabupaten Sumedang?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelaksanaan kebijakan sistem informasi pembangunan daerah terhadap manajemen data dan informasi pembangunan dalam mewujudkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah pada SKPD Kabupaten Sumedang.

#### TINJAUAN PUSTAKA

Teori pembangunan adalah serangkaian teori yang digunakan sebagai acuan cara untuk membangun sebuah masyarakat. (Jamaludin, Adon Nasrullah, 2016; 39). Pembangunan sering dikaitkan dengan modernisasi dan industrialisasi. Gouled (1977) dalam Anggara dan Sumantri (2016; 45) menegaskan bahwa pembangunan, modernisasi, dan industrialisasi mencakup proses perubahan. Pembangunan adalah salah satu bentuk perubahan sosial; modernisasi adalah bentuk khusus (special case) dari pembangunan; industrialisasi adalah salah satu segi (a single facet) dari pembangunan.

Perencanaan adalah adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan; rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama

proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna, "perencanaan kembali" kadang-kadang dapat menjadi faktor kunci pencapaian sukses akhir. Oleh karena itu perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin. (Handoko T. Hani, 2015;77-78).

Setelah suatu kebijakan sudah ditetapkan maka kebijakan tersebut perlu untuk diimplementasikan. Implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan dasar, dalam hal ini dapat berupa undang-undang, perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting, ataupun keputusan badan peradilan. (Suaib, Muhammad Ridha, 2016;83-85).

Dalam hal ini, implementasi kebijakan pembangunan memerlukan adanya kebijakan yang jelas dan terukur, kemudian didukung oleh SDM yang kompeten, media yang memadai, begitupun dalam hal manajemen pembangunan khususnya manajemen data dan informasi pembangunan perencanaan pembangunan perlu diawali dengan dukungan perencanaan yang jelas dan terukur tujuannya, kemudian memerlukan tenaga ahli yang kompeten dalam pelaksanaannya, sarana, prasarana, teknologi serta didukung oleh sistem pengendalian yang baik. Dengan adanya implementasi suatu kebijakan kemudian didukung oleh manajemen pembangunan yang baik maka sangat terlihat dengan jelas bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan secara efektif, dengan langsung melakukansurvei terhadap kepuasan masyarakat secara rutin, yang kemudian pemerintah memberikan informasi yang terpadu kepada masyarakat.serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan.

## METODE

Memperhatikan kerangka pemikiran pada bab 1 maka rumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah rumusan masalah asosiatif atau hubungan kausal efektif yaitu hubungan yang bersifat sebab dan akibat. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian eksplanasi, yaitu metode dengan menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dalam hal penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode

deskriptif analisis menggunakan teknik survey, penelitian deskriptif adalah penelitian yang ada hubungannya dengan pemaparan suatu fenomena atau hubungan antara dua atau lebih fenomena, dan metode ini seringkali menggunakan teknik Survey. Ciri - ciri khas penelitian deskriptif:

1. Lebih memperhatikan dalam mendapatkan sampel populasi yang representative dalam penelitian;
2. Teknik atau prosedur pengumpulan data yang lebih tepat; dan
3. Pernyataan masalahnya lebih jelas.

Pada penelitian deskriptif dapat diperluas ruang lingkup penelitiannya, masalah yang akan diselidiki dinyatakan dengan sangat tajam dan lebih ekonomis, dan karena itu akan mampu mengidentifikasi unsur-unsur khas yang spesifik. Iskandar (2015:174-176).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara besar yang dikaruniai kekayaan alam yang berlimpah. Indonesia berpotensi menjadi negara yang maju dan kuat jika mampu mengelola kekayaan alamnya dengan baik. Pengelolaan alam untuk kemajuan bangsa berkaitan dengan manajemen pembangunan. Meskipun kita sudah memiliki manajemen pembangunan yang cukup baik, namun belum sempurna.

Ada berbagai kelemahan dalam manajemen pembangunan, seperti masalah perencanaan, pelaksanaan, kelembagaan,

sumber daya manusia, sinergitas antar lembaga, peran serta masyarakat/swasta, pengelolaan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan, pengendalian pembangunan, dan sebagainya (Syaodih, 2015;1).

Perencanaan pembangunan secara nasional sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diikuti dengan peraturan perundangan yang lebih rinci yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah sehingga pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah diseluruh Indonesia sudah terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, kabupaten/kota adalah merupakan ujung tombak pembangunan nasional, hampir semua kebijakan tentang pembangunan dioperasionalkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Permasalahan pembangunan yang saat ini sering dihadapi khususnya oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang adalah masalah infrastruktur wilayah, perekonomian, tenaga kerja, kesejahteraan masyarakat, kebencanaan, dan lingkungan hidup. Adapun permasalahan perencanaan pembangunan yang dihadapi adalah adanya keterbatasan dalam penganggaran yang seharusnya sesuai dengan paradigma perencanaan yang masih digunakan adalah anggaran berbasis kinerja, belum bisa terlaksana, masih sering terjadi munculnya program/kegiatan dalam APBD diluar RKPD dalam hal ini sangat berkaitan dengan masih kurang baiknya manajemen data dan informasi pembangunan, serta sering terjadinya keterlambatan pengesahan APBD.

Kabupaten Sumedang sudah memiliki dokumen rencana pembangunan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011-2031;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018;
4. Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang setiap tahunnya;
5. Rencana Strategis pada setiap SKPD; dan
6. Rencana Kerja pada setiap SKPD.

Banyaknya permasalahan pembangunan seringkali tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang memadai, maka Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan upaya yang inovatif agar menjamin pembangunan dapat dilaksanakan diseluruh wilayah Kabupaten Sumedang secara merata dan proporsional, menjamin seluruh urusan pemerintahan dapat dibiayai secara proporsional dan tidak terjadinya penganggaran ganda dari sumber yang berbeda untuk program/kegiatan yang sama di wilayah yang sama, hal ini dilakukan dengan:

1. Disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah, yang bertujuan: (a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; (e) Menjamin tercapainya

- penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan (f) Memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
2. Disusunnya Peraturan Bupati tentang Besaran dan Peruntukan Pagu Indikatif Sektoral dan Kewilayahan Kabupaten Sumedang untuk setiap tahun anggaran, yang menentukan: (a) Indikator penentuan pagu indikatif sektoral dan kewilayahan; (b) Penetapan pagu indikatif sektoral dan kewilayahan; (c) Peruntukan pagu indikatif sektoral dan kewilayahan; dan (d) Pengelolaan pagu indikatif sektoral dan kewilayahan.
  3. Dilaksanakannya musyawarah perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan musyawarah perencanaan program pemberdayaan masyarakat mandiri atau program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM).
  4. Melakukan sinergitas perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, serta menghimpun dana dari berbagai sumber seperti perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).
  5. Disusunnya Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kabupaten Sumedang, yang bertujuan: (a) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah; (b) Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah; (c) Meningkatkan kualitas pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; dan (d) Meningkatkan kualitas pelayanan diseminasi data dan informasi pembangunan daerah.
  6. Serta bermanfaat untuk: Pengambilan keputusan; Pengembangan organisasi; Peningkatan pelayanan publik; dan Peningkatan kepercayaan publik.
  7. Disusunnya Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperkokoh jatidiri aparatur pemerintah daerah dan masyarakat serta menguatkan daya saing daerah. Manajemen pembangunan sudah dilaksanakan oleh masyarakat sumedang sejak lama, hal ini selaras dengan nilai-nilai filosofis yang selama ini dianut dalam menjalankan kepemimpinan berbasis budaya sunda (Kasumedangan) yang meliputi: (a) Nilai filosofis "Insun Medal Insun Madangan" (Aku Lahir Untuk Memberi Penerangan); (b) Nilai manajerial (Rawayan jati sunda); (c) Nilai operasional (dasa marga raharja): Taqwa; Someah; Surti; Jembar; Bruk brak; Guyub; Motekar; Tarapti, taliti, ati-ati; Junun jucung dan Punjul luhung.
- Di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang adalah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Secara structural Bappeda merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan dan sosial, bidang ekonomi, bidang

fisik dan bidang pengolahan data, monitoring dan evaluasi;

2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang, bahwa Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas pokok dan uraian tugas tersendiri dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi badan, tugas pokok kepala badan dimaksud adalah membantu bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun uraian tugasnya adalah:

1. Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian Badan;
2. Mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD dan RKPD;
3. Mengendalikan pelaksanaan tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mulai dari perumusan pagu indikatif, penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan rencana;
4. Mengendalikan perumusan rencana umum tata ruang;
5. Mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
6. Mengendalikan pelaksanaan pengendalian perencanaan

7. Mengendalikan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah;
8. Mengendalikan pelaksanaan penyiapan pagu indikatif didasarkan pada indikator pembangunan daerah, memfasilitasi nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD serta mensosialisasikannya kepada publik;
9. Mengendalikan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, RAPBD dan perhitungan APBD bersama sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD; dan
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu oleh:

1. Sekretariat;
2. Bidang Pemerintahan dan Sosial;
3. Bidang Ekonomi;
4. Bidang Fisik;
5. Bidang Pengolahan Data, Monitoring dan Evaluasi;
6. UPTB Penelitian dan Pengembangan; dan
7. Jabatan Fungsional.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya sebagaimana yang telah disajikan, peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapat responden mengenai variabel Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah, menunjukkan nilai yang cukup baik dan perlu upaya untuk ditingkatkan. Hal

ini menunjukkan bahwa responden telah mengetahui akan kebijakan sistem informasi pembangunan daerah yaitu berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, sudah tersampaikan dengan baik, serta responden telah memahaminya. Namun data menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang mengimplementasikan kebijakan sistem informasi daerah masih kurang atau belum optimal. Selain dari itu data juga menunjukkan masih perlu peningkatan kompetensi pegawai dalam implementasi kebijakan ini.

2. Pendapat responden mengenai variabel Manajemen Data dan Informasi Pembangunan sudah cukup baik dan perlu untuk ditingkatkan, data menunjukkan bahwa pimpinan SKPD pada umumnya sudah peduli dengan pentingnya manajemen data dan informasi pembangunan dengan baik. Namun dalam pihak data menunjukkan bahwa masih kurangnya tindakan/hukuman yang dapat membuat jera terhadap pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau mungkin ada unsur pembiaran, begitupun masih kurangnya penghargaan bagi pegawai yang melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Pendapat responden mengenai variabel Efektivitas Perencanaan Pembangunan Pada SKPD sudah baik dengan kategori seluruhnya tinggi dan sangat tinggi, data menunjukkan bahwa program/kegiatan sudah memiliki kejelasan ukuran/indikator, namun masih potensial untuk ditingkatkan.
4. Hasil pengujian terhadap hipotesis penelitian menunjukkan bahwa secara empiric hipotesis utama dapat diterima yaitu implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah berpengaruh nyata terhadap manajemen data dan informasi

pembangunan dalam mewujudkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah pada SKPD Kabupaten Sumedang. Sub hipotesis dalam penelitian ini dapat diterima, yaitu implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah berpengaruh nyata terhadap manajemen data dan informasi pembangunan, implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah berpengaruh nyata terhadap efektivitas perencanaan pembangunan daerah pada SKPD Kabupaten Sumedang dan manajemen data dan informasi pembangunan berpengaruh nyata terhadap efektivitas perencanaan pembangunan daerah pada SKPD Kabupaten Sumedang.

Adapun besarnya pengaruh-pengaruh tersebut diatas adalah sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah terhadap manajemen data dan informasi pembangunan dalam mewujudkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah pada SKPD Kabupaten Sumedang sebesar 25,5%.
2. Terdapat pengaruh implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah terhadap manajemen data dan informasi pembangunan sebesar 16,0%.
3. Terdapat pengaruh implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah terhadap efektivitas perencanaan pembangunan pada SKPD Kabupaten Sumedang sebesar 25,2%.
4. Terdapat pengaruh manajemen data dan informasi pembangunan daerah terhadap efektivitas perencanaan pembangunan pada SKPD Kabupaten Sumedang sebesar 27,7%.

Saran-saran untuk perbaikan dalam implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah. Berdasarkan latar belakang hasil penelitian yang berkaitan dengan fenomena masalah pada implementasi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah yang sudah dibahas, memperhatikan permasalahan pada hasil penelitian, kajian teoritik dan kesimpulan tersebut diatas, bahwa masih adanya persepsi responden mengenai pegawai dalam pelaksanaannya dianggap masih kurang jumlahnya dan masih kurang kompetensinya.

Saran untuk memperbaiki permasalahan tersebut adalah dengan menambah jumlah pegawai dan meningkatkan kompetensinya. Sehingga peneliti menyarankan untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Merekrut pegawai, dalam memenuhi kebijakan sistem informasi pembangunan daerah.
2. Mensosialisasikan kembali kebijakan sistem informasi pembangunan daerah dengan lebih intensif kepada pelaksana kebijakan.
3. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan khusus dalam hal kebijakan sistem informasi pembangunan daerah.
4. Menyelenggarakan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk peningkatan kompetensi pegawai seperti melaksanakan program magang bagi pengelola sistem informasi pembangunan daerah di instansi terkait dilingkup pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin, 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Gava Media.
- Amirullah, 2015. *Pengantar Manajemen Fungsi - Proses - Pengendalian*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Anngara, Sahya, dan Sumantri, Ii, 2016. *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Dunn, William N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Feriyanto, Andri, dan Triana Endang Shyta, 2015. *Pengantar Manajemen (3 In 1)*, Kebumen, Media Tera.
- Handoko, T.Hani., 2015. *Manajemen*, Edisi Ke-2, Cetakan Ke-27, Yogyakarta, BPFE.
- Iskandar, Jusman, 2015. *Kapita Selekta Administrasi Negara*, Bandung, Puspaga.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim, 2014. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*, Bandung, Penerbit Refika Aditama.
- Jamaludin, Adon Nasrullah, 2016. *Sosiologi Pembangunan*, Bandung, CV. Pstaka Setia.
- Listyaningsih, 2014. *Administrasi Pembangunan Pendekatan Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*, Yogyakarta, Gava Media.
- Siagian, Sondang, 2015. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara.

- Soleh, Chabib, 2014. *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan, Bandung, Fokus Media.*
- Suaib, Muhammad Ridha, 2016. *Pengantar Kebijakan Publik Dari Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Good Governance, Hingga Implementasi Kebijakan, Yogyakarta, Calpulis.*
- Subkhi,, Akhmad, dan Jauhar Mohammad, 2013. *Pengantar Teori & Perilaku Organisasi, Jakarta, Prestasi Pustaka.*
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung, Alfabeta.*
- Suharto, 2012. *Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya, Indah.*
- Suranto, 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan, Penelusuran Konsep dan Teori, Implementasi Kebijakan Otonomi Pelayanan Pendidikan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.*
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi tentang Administrasi Publik, Jakarta, Erlangga.*
- Syaoudih, Ernady, 2015. *Manajemen Pembangunan Kabupaten dan Kota, Bandung, Refika Aditama.*
- Usman, Syarifuddin, 2014. *Efektivitas Pelayanan Publik dalam Konflik Pemekaran Daerah, Manajemen Birokrasi dan Kebijakan, Penelusuran Konsep dan Teori, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.*
- Wasistiono, Sadu, 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan, Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi Pemerintahan/Pemda. Bandung, IPDN Press.*
- Wahab, Solichin Abdul, 2015. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta, Bumi Aksara.*
- Zainudin, Arif, 2014. *Efektivitas Kebijakan Pembangunan Daerah, Manajemen Birokrasi dan Kebijakan, Penelusuran Konsep dan Teori, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.*